



Evaluasi Program Penyaluran Beasiswa Kaltara Unggul Pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

Basmar¹, Nurmadhani Fitri Suyuthi², Syamsuddin Bidol³

^{1,2,3} Program Magister Manajemen, Universitas Fajar, Makassar

Abstract

This study aims to identify weaknesses in the scholarship distribution process and formulate strategies to optimize its implementation so that it becomes more targeted and efficient. The research method used is a descriptive qualitative method with a case study approach. The results of the study show that the scholarship distribution process includes online registration, administrative selection, interviews (if needed), data verification, recipient determination, and fund disbursement through partner banks. The main obstacles found include incomplete student data, unstable internet networks, slow verification processes, and ineffective coordination between institutions. Uneven information dissemination also caused confusion among students.

Keywords: Scholarship; Optimization; Scholarship Distribution; North Kalimantan.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan dalam proses penyaluran beasiswa serta merumuskan strategi yang dapat mengoptimalkan pelaksanaannya agar lebih tepat sasaran dan efisien. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyaluran beasiswa mencakup pendaftaran online, seleksi administrasi, wawancara (jika diperlukan), verifikasi data, penetapan penerima, dan pencairan dana melalui bank mitra. Kendala utama yang ditemukan antara lain adalah data mahasiswa yang tidak lengkap, jaringan internet yang tidak stabil, proses verifikasi yang lambat, serta koordinasi antar instansi yang kurang efektif. Informasi yang tidak merata juga menyebabkan kebingungan di kalangan mahasiswa.

Kata Kunci: Beasiswa; Optimalisasi; Penyaluran Beasiswa; Kalimantan Utara.

Article info

Received (13/01/2026)

Revised (17/02/2026)

Accepted (18/03/2026)

Corresponding_ basarmubarak75@gmail.com

DOI: 10.47354/mjo.v5i1

I. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam meningkatkan sumber daya manusia (SDM). Melalui pendidikan, individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk menghadapi tantangan kehidupan. Daerah yang memiliki masyarakat dengan tingkat pendidikan tinggi cenderung lebih cepat berkembang karena mampu menghasilkan tenaga kerja yang kompeten, inovatif, dan produktif. Sehingga, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana mecerdaskan kehidupan bangsa, tetapi juga sebagai penggerak dalam pembangunan daerah.

Dalam melakukan pengembangan potensi dan mencerdaskan bagi kemajuan suatu bangsa, menurut Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya memiliki spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Hal ini juga dijamin dalam UUD 1945 tentang hak mendapatkan pendidikan tercantum dalam Pasal 28C Ayat 1 dan Pasal 28E Ayat 1. Namun tidak pada kenyataannya masih terdapat anak usia sekolah yang tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi karena keterbatasan kemampuan ekonomi orang tua.

Selain itu, pendidikan berperan penting dalam menciptakan kesetaraan dan membuka peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup. Semakin tinggi akses dan kualitas pendidikan di suatu daerah, semakin besar pula peluang daerah tersebut untuk mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan kesejahteraan, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan. Oleh sebab itu, investasi di bidang pendidikan merupakan langkah strategis untuk memperkuat daya saing daerah sekaligus menjawab tantangan globalisasi yang menuntut kompetensi tinggi.

Salah satu bentuk dukungan nyata dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui program beasiswa. Beasiswa memiliki peran strategis dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Kehadiran beasiswa dapat mengurangi hambatan ekonomi yang sering kali menjadi penghalang utama bagi peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Adanya dukungan biaya pendidikan, siswa atau mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu tetap memiliki kesempatan untuk meraih pendidikan yang layak. Hal ini pada akhirnya akan membantu menciptakan pemerataan akses pendidikan di seluruh lapisan masyarakat.

Selain membuka akses, beasiswa juga berfungsi sebagai motivasi bagi peserta didik untuk meningkatkan prestasi akademik maupun non-akademik. Penerimaan beasiswa seringkali mensyaratkan kriteria tertentu, seperti nilai akademik, prestasi, atau keaktifan dalam kegiatan tertentu. Dengan begitu, peserta didik terdorong untuk berusaha lebih keras dalam meraih prestasi agar dapat memperoleh maupun mempertahankan beasiswa. Pada akhirnya, program beasiswa tidak hanya membantu secara finansial, tetapi juga menjadi instrumen untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat secara menyeluruh.

Dampak positif beasiswa tidak hanya dirasakan oleh penerimanya secara individu, tetapi juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia secara umum. Program beasiswa membuka kesempatan bagi kelompok kurang mampu untuk memperoleh pendidikan berkualitas, yang kemudian akan meningkatkan taraf hidup dan mobilitas sosial mereka. Sehingga beasiswa menjadi salah satu instrumen penting dalam upaya pemerataan pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia di masyarakat luas.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menyadari bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan kunci utama dalam mempercepat pembangunan daerah. Salah satu langkah nyata yang dilakukan adalah melalui peluncuran program Beasiswa Kaltara Unggul. Program ini dirancang untuk memberikan kesempatan bagi pelajar dan mahasiswa berprestasi agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi tanpa terbebani masalah biaya. Selain itu, program ini juga menyasar mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu, sehingga pendidikan tinggi dapat diakses secara lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Program Beasiswa Kaltara Unggul ini dirancang sebagai bagian dari upaya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kaltara, terutama di daerah perbatasan dan pedalaman yang masih mengalami keterbatasan akses terhadap layanan dasar. Dalam pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan, Gubernur Kalimantan Utara melalui Surat Keputusan Nomor 188.44/K.606/2023 memberikan beasiswa khusus Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023. Program Beasiswa Kaltara Unggul mencakup berbagai jenjang pendidikan mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, baik di dalam maupun luar negeri. Pada tahun 2023, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp15 miliar untuk lebih dari 8.000 penerima beasiswa yang meliputi pelajar berprestasi akademik, peserta didik keagamaan, serta mahasiswa. Program ini tidak hanya menyediakan dana pendidikan, tetapi juga mendukung biaya hidup, transportasi, dan insentif bagi para penerima beasiswa, sehingga secara menyeluruh memberikan dukungan bagi kelancaran studi mereka (Dinas Komunikasi, Informatika, 2023).

Kehadiran Beasiswa Kaltara Unggul, pemerintah berharap dapat menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing di masa depan, khususnya dalam menghadapi tantangan pembangunan daerah perbatasan dan tertinggal. Program ini diharapkan tidak hanya berdampak pada penerima secara individual, tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi kemajuan Kalimantan Utara secara keseluruhan. Melalui beasiswa ini,

pemerintah berupaya membangun fondasi kuat dalam membentuk generasi yang cerdas, produktif, dan berintegritas tinggi.

Namun, terdapat beberapa kendala utama yang dihadapi seperti koordinasi antar instansi yang masih terdapat kurangnya sinergi antara BKR, dinas terkait, serta pemerintah daerah dalam menyalurkan program secara efektif. Lalu, keterbatasan anggaran dan tenaga kerja sering menjadi penghambat dalam mencapai target distribusi yang merata. Serta, pemahaman masyarakat yang belum sepenuhnya memahami prosedur dan manfaat dari program ini, sehingga partisipasi mereka masih rendah untuk mengidentifikasi permasalahan utama dalam implementasi program Kaltara Unggul dan menemukan strategi yang lebih optimal untuk meningkatkan efektivitas distribusi program, memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem penyaluran kesejahteraan masyarakat.

Meskipun program Beasiswa Kaltara Unggul telah diluncurkan dengan tujuan mulia, keberhasilannya tetap perlu dievaluasi secara berkala. Evaluasi penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana program ini mampu menjangkau sasaran yang tepat, baik dari sisi jumlah penerima maupun kriteria kelayakan yang ditetapkan. Adanya evaluasi, dapat diidentifikasi berbagai kendala yang mungkin muncul, seperti keterlambatan penyaluran, ketidaksesuaian penerima, atau ketidakmerataan distribusi beasiswa di wilayah Kalimantan Utara. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk melakukan optimalisasi dalam penyaluran program Beasiswa Kaltara Unggul. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas program, serta merumuskan strategi yang tepat untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam mengenai kondisi penyaluran program Kaltara Unggul saat ini, menganalisis hambatan yang ada, serta merumuskan rekomendasi strategi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program Kaltara Unggul melalui Biro Kesejahteraan Rakyat. Dengan demikian, diharapkan manfaat program ini dapat dirasakan lebih merata dan optimal

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian dan Jenis-Jenis Beasiswa

Beasiswa merupakan bentuk bantuan pendidikan berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada pelajar atau mahasiswa agar dapat melanjutkan pendidikan tanpa terbebani biaya studi yang tinggi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), beasiswa adalah tunjangan yang diberikan kepada pelajar atau mahasiswa sebagai bantuan biaya belajar. Murniasih (2009) menambahkan bahwa beasiswa adalah bentuk penghargaan kepada individu yang memungkinkan mereka melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, baik dalam bentuk akses maupun bantuan keuangan. Secara kuantitatif, beasiswa bisa mencakup berbagai bentuk mulai dari biaya kuliah, akomodasi, dana hidup, hingga pembiayaan riset atau publikasi ilmiah. Ini berbeda dengan pinjaman karena tidak perlu dikembalikan.

Dalam kerangka akademik, beasiswa dapat dipahami sebagai intervensi pendidikan yang bertujuan mengurangi hambatan biaya, mendorong pemerataan akses, serta memperkuat kualitas sumber daya manusia. Secara umum, ada dua tujuan utama: (a) meningkatkan akses pendidikan bagi individu yang memiliki keterbatasan finansial atau prestasi tinggi; dan (b) memotivasi penerima berkembang lebih lanjut dalam bidang akademik, penelitian, atau bidang non-akademik tertentu.

Sistem Penyaluran Beasiswa di Indonesia

Untuk memahami sistem penyaluran beasiswa secara komprehensif, kita perlu meninjau sistem ini melalui beberapa pendekatan teoretis, seperti teori kebijakan publik, teori keadilan distributif, dan teori akses pendidikan. Melalui pendekatan tersebut, kita dapat menganalisis bagaimana sistem ini dirancang, diterapkan, serta tantangannya, khususnya dalam konteks pemerataan di daerah. Sistem beasiswa nasional Indonesia terbagi dalam dua jalur utama: 1) Jalur Pemerintah Pusat terdiri Beasiswa LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan), KIP Kuliah (Kartu Indonesia Pintah Kuliah), dan Beasiswa Unggulan Kemendikbudristek. 2) Jalur Pemerintah Daerah terdiri Kartu Jakarta Pintar (KJP) – DKI Jakarta, Beasiswa Satu Desa Satu Sarjana – Aceh, Kalimantan Barat, Papua Barat, dan Beasiswa Berprestasi Provinsi Jawa Timur.

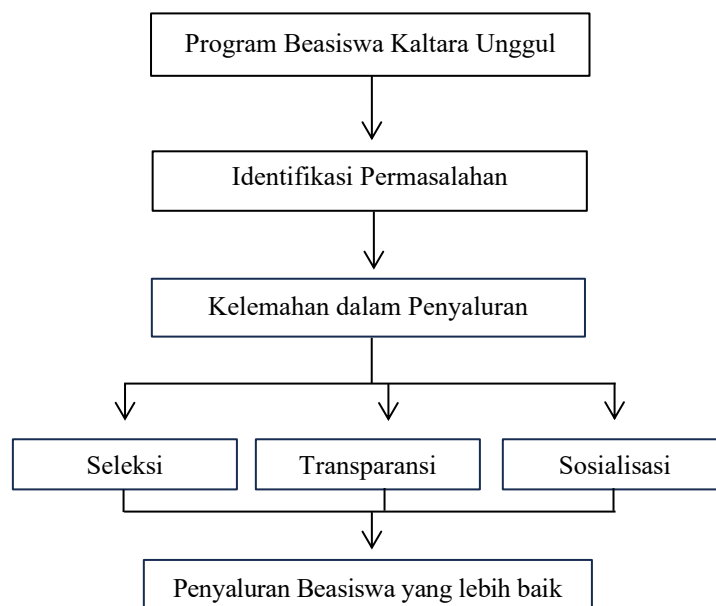
Optimalisasi Penyaluran Beasiswa

Optimalisasi penyaluran beasiswa dapat dipahami sebagai proses peningkatan efisiensi, efektivitas, keadilan, dan keberlanjutan dalam sistem pendistribusian bantuan pendidikan agar mampu menjangkau kelompok sasaran secara tepat. Tujuan dari optimalisasi ini tidak hanya untuk meningkatkan jumlah penerima, tetapi juga untuk memastikan bahwa bantuan pendidikan berdampak langsung terhadap peningkatan akses, kualitas, dan hasil belajar. Secara khusus, optimalisasi juga bertujuan untuk Meningkatkan ketepatan sasaran penerima beasiswa, Mencegah duplikasi dan tumpang tindih bantuan antarprogram dan antarinstitusi, Memperkuat transparansi dan akuntabilitas sistem penyaluran, Mendorong pemerataan akses pendidikan antarwilayah dan antarkelompok sosial

Kerangka Pikir

Program Beasiswa Kaltara Unggul merupakan salah satu bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui akses pendidikan yang lebih merata dan berkeadilan. Meskipun telah berjalan selama beberapa tahun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai tantangan yang menghambat efektivitas penyaluran beasiswa tersebut. Berbagai keluhan dari masyarakat maupun hasil observasi awal menunjukkan adanya sejumlah kelemahan dalam proses penyaluran beasiswa, seperti ketidaktepatan sasaran penerima, kurangnya transparansi dalam seleksi, lemahnya sosialisasi informasi program ke daerah-daerah terpencil, serta keterbatasan monitoring dan evaluasi. Permasalahan-permasalahan tersebut dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap program dan berdampak langsung pada pencapaian tujuan beasiswa itu sendiri.

Selanjutnya, hasil dari analisis tersebut akan dijadikan dasar untuk merumuskan strategi yang tepat dalam mengoptimalkan penyaluran beasiswa. Strategi yang dirumuskan mencakup aspek perbaikan sistem seleksi, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, pemanfaatan teknologi informasi untuk memperluas jangkauan sosialisasi, serta penerapan sistem evaluasi yang berkelanjutan. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan yang ada, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan strategi kebijakan yang lebih efektif dan berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan di Provinsi Kalimantan Utara.



Gambar 1. Kerangka Pikir

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Penelitian ini menggunakan studi kasus untuk memahami bagaimana kebijakan dan praktik penyaluran beasiswa Kaltara Unggul dilakukan, kendala yang dihadapi, serta bagaimana evaluasi strategi dapat diterapkan. Lokasi penelitian di Provinsi Kalimantan Utara dengan waktu penelitian ini berfokus pada waktu yang relevan, dimana proses kebijakan, tantangan dalam implementasi, serta strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas penyaluran beasiswa pada waktu yang relevan. Informan dalam penelitian ini dipilih secara purposive, yaitu dengan mempertimbangkan kesesuaian dan relevansi pengalaman serta pengetahuan informan terhadap topik penelitian, yaitu penyaluran Beasiswa Kaltara Unggul. Kriteria informan ditetapkan agar data yang diperoleh bersifat mendalam, relevan, dan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai permasalahan dan strategi optimalisasi penyaluran beasiswa tersebut

Teknik Pengumpulan data yaitu kegiatan yang dilakukan dengan cara mengamati apa saja yang terdapat pada penelitian di lapangan berdasarkan kenyataan yang ada. Teknik Pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini dengan cara Observasi, Wawancara, dan Studi dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif atau teknik yang digunakan untuk menganalisis data dengan menggambarkan data apa adanya. Dalam penelitian ini, alat ukur yang digunakan untuk memperoleh data adalah data primer dan data sekunder. Data yang terkumpul kemudian dapat dianalisis untuk mendapatkan gambaran umum mengenai evaluasi Beasiswa Kaltara Unggul yaitu Menilai efektivitas program, Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, Mendapatkan masukan untuk perbaikan, dan Memenuhi kebutuhan penerima beasiswa.

IV. HASIL/TEMUAN

Dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia di Provinsi Kalimantan Utara, maka Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan pemberian beasiswa dengan Nama Beasiswa Kaltara Unggul. Bantuan beasiswa pendidikan di Provinsi Kalimantan Utara, sebagai provinsi termuda di Indonesia menghadapi berbagai tantangan namun juga menunjukkan perkembangan positif. Bantuan beasiswa sangat dinantikan, penerima bantuan biaya pendidikan merasakan manfaatnya yang tertulis dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 35 Tahun 2021 tentang pemberian Beasiswa Kaltara Unggul. Beasiswa Kaltara Unggul merupakan program beasiswa pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Utara kepada putra-putri daerah untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Sasaran dari Beasiswa Kaltara Unggul adalah peserta didik/peserta didik keagamaan/mahasiswa yang menempuh pendidikan dasar dan pendidikan menengah, pendidikan keagamaan serta pendidikan tinggi pada satuan pendidikan di dalam dan/atau di luar Provinsi Kalimantan Utara.

Secara umum program Beasiswa Kaltara Unggul diharapkan dapat berdampak pada kehidupan kesejahteraan, meningkatkan sumber daya manusia khususnya masyarakat Kalimantan Utara. Dalam meningkatkan sumber daya manusia di Provinsi Kalimantan Utara, maka program Beasiswa Kaltara Unggul tahun 2023 melalui Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan kegiatan pemberian beasiswa dengan sasaran bantuan pendidikan bagi peserta didik, peserta didik keagamaan dan mahasiswa Provinsi Kalimantan Utara dengan nama Beasiswa Kaltara Unggul. Sesuai dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pemberian Beasiswa Kaltara Unggul. Program Beasiswa Kaltara Unggul mengutamakan keluarga berlatar belakang tidak mampu atau miskin dengan bukti keterangan terdaftar pada data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten atau kota dengan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa atau Lurah setempat dan bukan penerima Beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) serta penerima beasiswa lainnya.

Berdasarkan hasil konsultasi dan wawancara peneliti dengan Gubernur Kalimantan Utara Dr. H. Zainal Arifin Paliwang, S.H., M.Hum. terkait Program Beasiswa Kaltara Unggul dengan pertanyaan bagaimana kebijakan bapak terkait adanya Program Beasiswa Kaltara Unggul yang sudah berjalan mulai tahun 2021- sampai sekarang.

"Beasiswa Kaltara unggul adalah salah satu program Unggulan Pemprov. Kaltara yang disalurkan setiap tahun secara simultan dengan Alokasi Anggaran Rp.15 Milyar yang diperuntukkan oleh para pelajar yang kurang mampu dan prestasi sebagai bagian manifestasi dalam meningkatkan SDM dan mempersiapkan generasi yang cerdas sehingga bisa memberikan kontribusi dan dapat dibanggakan sebagai aset daerah di Provinsi Kalimantan Utara".

Berikut petikan wawancara dari para informan atas rumusan masalah yang telah dirumuskan :

Apa saja yang menjadi kekurangan atau kelemahan dalam penyaluran Beasiswa Kaltara Unggul?

Bagaimana proses penyaluran Beasiswa Kaltara Unggul dilakukan dari awal hingga pencairan? Atas pertanyaan tersebut dari pihak Biro Kesejahteraan Rakyat memberi pernyataan bahwa :

"Proses beasiswa Kaltara Unggul dimulai dari sosialisasi, pendaftaran online, seleksi administrasi, wawancara, penetapan penerima, lalu dana dicairkan langsung ke rekening mahasiswa lewat kerja sama bank mitra pemerintah provinsi". (Informan 1)

Dari pertanyaan yang sama pihak informan lainnya dalam hal ini tim pengelola memberi jawaban :

"Prosesnya dimulai dari pendaftaran online, terus seleksi administrasi, lalu verifikasi data oleh tim, kemudian pengumuman penerima, dan terakhir pencairan dana langsung ke rekening mahasiswa lewat bank yang bekerjasama dengan pemerintah provinsi Kaltara. Semua berjalan transparan dan sesuai prosedur". (Informan 2)

Sementara itu dari pihak penerima memberi jawaban bahwa :

"Prosesnya dimulai dari daftar online, kemudian upload berkas. Abis itu diverifikasi, lalu ada pengumuman lulus. Setelah itu tinggal tunggu pencairan dana masuk ke rekening, biasanya lewat bank yang sudah ditunjuk pemerintah". (Informan 3)

Kesimpulan yang dapat ditarik dari jawaban informan adalah proses penyaluran Beasiswa Kaltara Unggul dimulai dari pendaftaran online dan pengunggahan berkas, diikuti oleh seleksi atau verifikasi administrasi dan akademik oleh tim terkait (baik dari kampus maupun pemerintah provinsi). Selanjutnya dilakukan wawancara (jika diperlukan), kemudian dilakukan verifikasi lanjutan dan penetapan penerima beasiswa. Setelah itu, dana beasiswa dicairkan langsung ke rekening mahasiswa/penerima melalui bank mitra pemerintah provinsi.

Beberapa informan juga menyoroti adanya prosedur birokrasi yang cukup panjang dan informasi yang kurang jelas sehingga membuat sebagian mahasiswa/penerima merasa kebingungan dalam proses pencairan.

1. Apa saja kendala teknis atau administratif yang sering dihadapi dalam proses penyaluran beasiswa ini?

Berdasarkan pertanyaan tersebut berikut petikan jawaban dari masing-masing informan sebagai berikut:

“Kendala biasanya data mahasiswa ada yang kurang lengkap, berkas lambat dikirim, kadang jaringan error waktu verifikasi, juga komunikasi kurang lancar antar instansi, itu biasa hambat proses.” (Informan 1)

“Kendala seringnya data mahasiswa tidak lengkap, berkas terlambat dikirim, jaringan internet di daerah susah, dan komunikasi antar instansi kadang kurang lancar. Itu bikin proses verifikasi dan pencairan beasiswa jadi lambat dan susah sesuai target waktu”. (Informan 2)

“Kendala yang sering kami hadapi itu kayak jaringan lemot waktu daftar, upload berkas susah, informasi kurang jelas, kadang juga pencairan lambat. Jadi kami harus sering tanya ke kampus atau cek info dari media sosial supaya kada ketinggalan. (Informan 3)

“Kendala paling sering itu biasanya di data mahasiswa tidak lengkap, kadang salah input, juga masalah verifikasi lambat, karena koordinasi antar instansi kurang lancar. Kadang juga pencairan lambat karna proses administrasi di pusat banyak tahapnya, jadi tidak bisa langsung cair”. (Informan 4)

“Kendala teknis dan administratifnya banyak, mulai dari data yang sering salah, proses verifikasi lama, sampai komunikasi yang kurang jelas. Kadang kita rasa ada favoritisme, jadi beasiswa ini sulit dijangkau buat yang benar-benar perlu. Bikin frustrasi dan males daftar lagi”. (informan 5)

“Kendala teknis sering terjadi karena data mahasiswa yang tidak lengkap atau salah input, membuat proses verifikasi jadi tertunda. Administratif juga terkadang lambat karena birokrasi yang panjang dan koordinasi antar instansi yang belum optimal. Ini jadi hambatan utama dalam penyaluran beasiswa tepat waktu dan lancar”. (Informan 6)

Kendala yang sering dihadapi dalam penyaluran Beasiswa Kaltara Unggul meliputi data mahasiswa yang tidak lengkap atau salah input, serta keterlambatan pengumpulan berkas. Selain itu, masalah jaringan internet, terutama saat pendaftaran dan unggah berkas, menjadi hambatan teknis utama. Dari sisi administratif, proses verifikasi sering lambat akibat birokrasi yang panjang dan koordinasi antar instansi yang belum optimal. Informasi yang kurang jelas atau tidak merata juga menimbulkan kebingungan bagi mahasiswa. Beberapa pihak bahkan merasakan adanya ketidakadilan atau favoritisme, yang menurunkan motivasi untuk mengikuti program.

2. Menurut Anda, apakah sistem seleksi dan verifikasi penerima sudah adil dan transparan?

Berdasarkan pertanyaan tersebut berikut petikan jawaban dari masing-masing informan sebagai berikut:

“Ulu rasa sistem sudah cukup adil dan transparan, karna pakai seleksi online, verifikasi berlapis-lapis, penilaian tim independen, dan hasilnya diumumkan terbuka supaya kada ada kecurigaan”. (informan 1)

“Sudah lumayan adil dan transparan, karna prosesnya online, hasil seleksi diumumkan terbuka. Cuma kadang masih ada mahasiswa yang merasa kurang jelas penilaiannya, jadi mungkin perlu lebih rinci lagi penjelasan tiap tahap seleksi. (Informan 2)

“Sistemnya sudah lumayan adil, tapi masih ada yang merasa tidak transparan. Harusnya info lulus itu jelas disampaikan. Proses verifikasi harus lebih terbuka, supaya mahasiswa paham kenapa bisa lulus, kenapa pulang tidak lulus”. (Informan 4)

“Sistem seleksi dan verifikasi rasanya kurang adil dan kurang transparan. Kadang orang yang kita kenal dapat, tapi yang pantes malah tidak lolos. Informasi hasil seleksi juga kurang jelas, jadi susah percaya kalau prosesnya benar-benar jujur dan terbuka buat semua”. (Informan 5)

“Sistem seleksi dan verifikasi sudah berusaha adil dan transparan, tapi masih perlu ditingkatkan lagi. Harus ada pengawasan ketat supaya tidak ada penyimpangan. Informasi hasil seleksi harus terbuka untuk umum supaya masyarakat percaya, dan proses verifikasi harus cepat serta akurat supaya beasiswa tepat sasaran”. (Informan 6)

Sebagian besar informan menilai bahwa sistem seleksi dan verifikasi sudah cukup adil dan transparan, karena menggunakan proses online, verifikasi berlapis, serta penilaian oleh tim independen, dan hasil seleksi diumumkan secara terbuka. Namun, beberapa informan masih merasa bahwa transparansi belum sepenuhnya maksimal, terutama terkait kurangnya kejelasan informasi hasil seleksi, serta penjelasan penilaian tiap tahap. Ada juga kekhawatiran soal potensi ketidakadilan atau favoritisme, yang memengaruhi kepercayaan terhadap sistem. Oleh karena itu, perlu ada peningkatan pengawasan, penyampaian informasi yang lebih rinci, dan peningkatan akurasi serta kecepatan verifikasi agar sistem benar-benar dianggap adil dan transparan oleh semua pihak.

3. Apakah perlu adanya perubahan dalam kriteria penerima beasiswa agar program ini lebih adil?

Berdasarkan pertanyaan tersebut berikut petikan jawaban dari masing-masing informan sebagai berikut:

“Memang perlu ditinjau ulang kriterianya, supaya lebih merata. Misalnya menambah pertimbangan kondisi ekonomi keluarga, daerah asal, prestasi non-akademik. Supaya pian-pian di pelosok punya peluang yang sama.” (informan 1)

“Perlu ditinjau ulang kriteria penerima supaya lebih adil, misalnya memperhatikan kondisi ekonomi keluarga lebih detail, prestasi non-akademik, dan asal daerah. Dengan begitu, program beasiswa ini dapat merata dan menjangkau lebih banyak pelajar dari berbagai latar belakang yang membutuhkan bantuan”. (Informan 2)

"Ulun pikir perlu ditambah kriterianya, jangan hanya nilai tinggi, tapi liat kondisi keluarga, daerah asal, prestasi lain. Biar pian-pian yang sungguh perlu bantuan bisa dapat kesempatan yang sama lawan yang lain". (Informan 3)

"Iya, perlu ditinjau ulang kriterianya. Jangan cuma nilai tinggi, tapi lihat latar belakang ekonomi keluarga. Supaya anak-anak yang pintar tapi kurang mampu punya peluang besar dapat beasiswa, jadi lebih adil semua". (Informan 4)

"Iya, perlu benar diubah kriterianya. Kadang yang dikasih beasiswa itu yang biasa saja, sedangkan yang betul-betul susah dan butuh malah tidak kebagian. Harusnya dipikir ulang supaya lebih fokus kepada yang kurang mampu dan benar-benar butuh". (Informan 5)

"Perlu, terutama untuk memperjelas kriteria ekonomi dan prestasi akademik secara seimbang. Jangan hanya fokus pada nilai tinggi, tapi juga lihat latar belakang sosial dan ekonomi penerima. Ini biar program beasiswa Kaltara Unggul lebih merata, memberikan kesempatan kepada yang benar-benar membutuhkan dan berpotensi, sehingga program lebih adil dan efektif". (Informan 6)

Seluruh informan sepakat bahwa perubahan atau peninjauan ulang kriteria penerima beasiswa sangat diperlukan agar program menjadi lebih adil dan merata. Mereka mengusulkan agar kriteria tidak hanya berfokus pada prestasi akademik atau nilai tinggi, tetapi juga mempertimbangkan secara lebih serius kondisi ekonomi keluarga, asal daerah, serta prestasi non-akademik. Tujuannya adalah agar siswa dari latar belakang kurang mampu, terutama yang berasal dari daerah terpencil, tetap memiliki kesempatan yang setara untuk mendapatkan beasiswa. Dengan begitu, program beasiswa akan lebih tepat sasaran, berkeadilan sosial, dan efektif dalam membantu mereka yang benar-benar membutuhkan.

4. Apa peran yang bisa diambil oleh lembaga pendidikan, pemerintah, atau pihak swasta dalam mendukung keberhasilan program ini?

Berdasarkan pertanyaan tersebut berikut petikan jawaban dari masing-masing informan sebagai berikut:

"Lembaga pendidikan bisa bantu sosialisasi, mendampingi mahasiswa. Pemerintah daerah menyokong dana, kebijakan. Pihak swasta bisa jadi sponsor, bantu beasiswa tambahan. Bila semua pihak handak bekerjasama, program ini pasti kawa berhasil lawan maksimal." (informan 1)

"Lembaga pendidikan harus bantu sosialisasi dan dampingi mahasiswa selama proses beasiswa. Pemerintah menyediakan regulasi dan pendanaan yang memadai. Pihak swasta bisa jadi sponsor atau mitra untuk beasiswa tambahan. Dengan kerjasama semua pihak, program ini pasti berjalan lancar dan manfaatnya dirasakan oleh lebih banyak pelajar". (Informan 2)

"Lembaga pendidikan bisa bantu jelaskan info beasiswa, dampingi mahasiswa. Pemerintah terus dukung dananya. Pihak swasta bisa nambahin beasiswa atau jadi sponsor. Kalau semua pihak saling bantu, program ini pasti lebih berhasil dan merata". (Informan 3)

"Lembaga pendidikan bisa bantu sosialisasi program, mendata mahasiswa yang layak. Pemerintah harus mempercepat proses birokrasi, biar kade lambat. Pihak swasta bisa ikut nyumbang dana atau bikin program serupa. Jadi, kalau semua pihak turun tangan, beasiswa ini bisa lebih berhasil". (Informan 4)

"Lembaga pendidikan harus lebih jujur dan terbuka dalam mendata calon penerima beasiswa. Pemerintah perlu ngawasi proses biar tidak ada yang main-main. Pihak swasta jua bisa membantu dana atau fasilitas. Kalau semua ikut berperan, beasiswa ini bisa benar-benar bermanfaat buat yang layak". (Informan 5)

"Lembaga pendidikan harus aktif mendata dan mengawasi mahasiswa penerima beasiswa. Pemerintah perlu mempercepat proses administrasi dan pencairan dana. Pihak swasta bisa memberikan dukungan dana atau fasilitas pendukung. Kalau semua pihak bekerja sama dengan baik, program beasiswa ini akan berjalan lancar dan tepat sasaran". (Informan 6)

Keberhasilan program beasiswa memerlukan kerja sama aktif antara lembaga pendidikan, pemerintah, dan pihak swasta. Lembaga pendidikan berperan dalam sosialisasi, pendataan, dan pendampingan mahasiswa. Pemerintah bertanggung jawab atas pendanaan, regulasi, serta percepatan birokrasi. Pihak swasta dapat memberikan dukungan berupa dana, fasilitas, atau beasiswa tambahan. Jika semua pihak menjalankan perannya secara transparan dan bertanggung jawab, program beasiswa akan berjalan lancar, tepat sasaran, dan memberi manfaat lebih luas bagi para pelajar.

Bagaimana strategi yang dapat diambil untuk mengoptimalkan penyaluran beasiswa tersebut?

Pertanyaan Wawancara:

1. Apa saja hal yang menurut Anda perlu diperbaiki dalam proses penyaluran Beasiswa Kaltara Unggul?

Berdasarkan pertanyaan tersebut berikut petikan jawaban dari masing-masing informan sebagai berikut:

"Yang perlu diperbaiki itu sistem pendataan supaya lebih rapi, jaringan online harus stabil, sosialisasi diperluas ke daerah pelosok, lalu koordinasi antar instansi dibawa lebih lancar lagi, supaya penyaluran beasiswa kade lambat jua tepat sasaran, pian-pian penerima jua nyaman prosesnya". (Informan 1)

“Yang perlu diperbaiki dalam proses penyaluran beasiswa ini adalah sistem pendataan yang lebih rapi, jaringan internet yang lebih stabil, sosialisasi yang lebih luas ke daerah pelosok, serta koordinasi antar instansi supaya penyaluran berjalan lebih cepat dan tepat sasaran”. (Informan 2)

“Memurut ulun, yang perlu diperbaiki itu kejelasan informasi, biar tidak bingung. Terus jaringan sistemnya dibaguskan, jangan sering error. Jua pencairan dananya diusahakan lebih cepat, supaya mahasiswa bisa langsung memanfaatkan buat keperluan kuliah”. (Informan 3)

“Hal yang perlu diperbaiki itu sistem pendataan, supaya tidak banyak kesalahan. Proses verifikasi jua harus cepat, jangan terlalu lama. Informasi hasil seleksi harus jelas, terbuka. Pencairan dana pun harus tepat waktu, supaya mahasiswa kada kesulitan bayar kuliah atawa kebutuhan lainnya. (Informan 4)

“Yang perlu diperbaiki itu proses seleksi biar lebih jelas dan terbuka, jangan asal-asalan. Informasi hasil beasiswa harus cepat disampaikan. Proses pencairan dana jua harus diperbaiki, jangan sampai lama sekali, bikin orang yang butuh jadi susah dan kecewa”. (Informan 5)

“Yang perlu diperbaiki itu sistem pendataan biar lebih akurat, jangan ada data salah atau kurang lengkap. Proses verifikasi juga harus dipercepat supaya tidak berlarut-larut. Informasi hasil seleksi harus transparan, biar mahasiswa paham status mereka dan tidak bingung menunggu lama”. (Informan 6)

Proses penyaluran Beasiswa Kaltara Unggul perlu perbaikan dalam beberapa aspek penting, seperti sistem pendataan yang lebih rapi dan akurat, peningkatan stabilitas jaringan online, serta sosialisasi yang menjangkau daerah pelosok. Selain itu, perlu ada koordinasi yang lebih baik antar instansi, percepatan proses verifikasi dan pencairan dana, serta penyampaian informasi hasil seleksi yang jelas, terbuka, dan tepat waktu. Dengan perbaikan ini, penyaluran beasiswa akan lebih efisien, adil, dan nyaman bagi para penerima.

2. Strategi apa yang paling efektif untuk memastikan beasiswa ini tepat sasaran dan efisien?

Berdasarkan pertanyaan tersebut berikut petikan jawaban dari masing-masing informan sebagai berikut:

“Strategi paling efektif itu, pertama sosialisasi meluas sampai ke desa-desa, kedua sistem seleksi ketat dan transparan, ketiga verifikasi data berlapis dengan teknologi, jua koordinasi lancar antar instansi. Jangan lupa evaluasi berkala supaya beasiswa selalu tepat sasaran dan tidak ada penyalahgunaan dana”. (informan 1)

“Strategi paling efektif itu lawan memperkuat seleksi online, verifikasi data secara ketat, jua melibatkan pihak sekolah atau kampus. Sosialisasi jua digencarkan sampai ke pelosok. Evaluasi rutin tiap tahun penting, supaya beasiswa benar-benar sampai ka pian yang berhak, kada salah sasaran”. (Informan 2)

“Strategi paling efektif itu sosialisasi yang merata sampai ke desa, seleksi ketat tapi transparan, dan verifikasi data yang teliti. Evaluasi rutin jua penting supaya beasiswa sampai ka pian yang benar-benar perlu, dan dana tidak terbuang sia-sia”. (Informan 3)

“Strategi paling manjur tu pendataan harus akurat, verifikasi lapangan jua penting. Lalu, libatkan kampus dalam seleksi, karena pihak kampus tahu kondisi mahasiswa. Sistem online harus transparan, jadi kada ada kecurigaan soal siapa yang layak dapat”. (Informan 4)

“Strategi paling efektif tu harus ada transparansi penuh, data penerima harus dicek langsung ke lapangan. Libatkan masyarakat biar bisa ngawasi. Jangan cuma mengandalkan dokumen doang, supaya beasiswa ini benar-benar sampai ke yang betul-betul butuh dan tepat sasaran”. (Informan 5)

“Strategi paling efektif itu melibatkan koordinasi erat antara kampus, pemerintah, dan masyarakat. Pendataan harus valid dan akurat, verifikasi langsung ke lapangan supaya data tidak fiktif. Pakai sistem teknologi informasi yang transparan agar proses seleksi dan pencairan berjalan cepat dan tepat sasaran”. (Informan 6)

Strategi paling efektif untuk memastikan beasiswa tepat sasaran dan efisien meliputi sosialisasi yang merata hingga pelosok, seleksi ketat dan transparan, serta verifikasi data yang akurat melalui teknologi dan lapangan. Pelibatan pihak kampus dan masyarakat penting untuk pengawasan dan validasi data. Koordinasi antar instansi juga harus berjalan lancar. Evaluasi rutin diperlukan agar program terus membaik, menghindari penyalahgunaan dana, dan memastikan bantuan diterima oleh mereka yang benar-benar membutuhkan.

3. Bagaimana teknologi informasi bisa dimanfaatkan untuk mempercepat dan mempermudah proses seleksi dan penyaluran?

Berdasarkan pertanyaan tersebut berikut petikan jawaban dari masing-masing informan sebagai berikut:

“Teknologi informasi sangat penting, bisa dipakai buat pendaftaran online biar mudah dan cepat, data langsung terkumpul tanpa ribet. Sistem verifikasi otomatis jua bisa mengurangi kesalahan manusia. Selain itu, komunikasi antar tim lebih lancar lewat aplikasi, jadi proses seleksi dan pencairan dana lebih cepat dan transparan, meringankan kerja petugas juga”. (informan 1)

“Teknologi informasi banyak membantu, mulai pendaftaran online, verifikasi data otomatis, sampai pengumuman hasil seleksi. Data gampang diakses, proses jadi cepat dan efisien. Lewat sistem digital, kesalahan bisa diminimalkan. Komunikasi antar tim jua lebih lancar, jadi penyaluran beasiswa kada banyak hambatan”. (Informan 2)

“Teknologi informasi bisa mempermudah lewat pendaftaran online, jadi kada perlu datang langsung. Data bisa langsung dicek dan diverifikasi cepat. Hasil seleksi jua diumumkan lewat web atau aplikasi, bikin proses jadi lebih cepat dan transparan”. (Informan 3)

“Teknologi informasi bisa dipakai buat pendaftaran online, jadi kada perlu berkas fisik. Verifikasi jua bisa otomatis lewat sistem. Data mahasiswa bisa langsung masuk database, jadi proses seleksi sampai pencairan lebih cepat, rapi, dan mudah diawasi pihak terkait”. (Informan 4)

“Teknologi informasi bisa dipakai buat daftar online, jadi kita tidak perlu bolak-balik ke kantor. Hasil seleksi jua bisa diumumkan lewat sistem, biar cepat tau. Kalau data masuk otomatis, proses pencairan jadi lebih cepat dan transparan, jadi kada ada alasan lambat lagi”. (Informan 5)

“Teknologi informasi bisa dipakai buat pendaftaran online, verifikasi data otomatis, dan monitoring pencairan dana secara real-time. Ini bikin proses lebih cepat, rapi, dan transparan, sehingga mahasiswa tidak perlu bingung dan pemerintah bisa ngawasi penyaluran beasiswa dengan lebih baik”. (Informan 6)

Teknologi informasi mempercepat dan mempermudah proses seleksi dan penyaluran beasiswa melalui pendaftaran online yang praktis tanpa perlu berkas fisik. Verifikasi data otomatis mengurangi kesalahan dan mempercepat validasi. Pengumuman hasil seleksi dapat dilakukan secara digital sehingga lebih transparan dan cepat. Sistem digital juga memfasilitasi komunikasi antar tim serta monitoring pencairan dana secara real-time, menjadikan proses lebih efisien, rapi, dan mudah diawasi oleh pihak terkait.

4. Apakah perlu adanya perubahan dalam kriteria penerima beasiswa agar program ini lebih adil?

Berdasarkan pertanyaan tersebut berikut petikan jawaban dari masing-masing informan sebagai berikut:

“Perlu jua perubahan kriteria, supaya lebih adil dan merata. Misalnya nambah pertimbangan ekonomi, kondisi keluarga, dan prestasi non-akademik. Biar pian di daerah terpencil jua dapat kesempatan. Evaluasi berkala jua penting supaya kriteria selalu sesuai kebutuhan dan beasiswa benar-benar tepat sasaran, meringankan beban mereka yang perlu”. (informan 1)

“Perlu jua ditinjau ulang kriterianya, supaya lebih adil. Misalnya, nambah penilaian dari sisi ekonomi keluarga, daerah terpencil, jua prestasi non-akademik. Biar beasiswa ini benar-benar dirasakan pian-pian yang paling perlu bantuan”. (informan 2)

“Perlu jua, supaya lebih adil dan merata. Selain nilai, diperhatikan juga kondisi ekonomi dan asal daerah. Biar beasiswa bisa tepat bagi pian-pian yang benar-benar butuh, terutama dari daerah terpencil yang kadang susah dapat kesempatan”. (Informan 3)

“Perlu jua diubah sedikit kriterianya. Jangan cuma nilai tinggi dijadikan patokan, tapi lihat jua kondisi ekonomi keluarga. Anak yang rajin tapi hidup susah harusnya dikasih kesempatan jua, supaya beasiswa ini benar-benar adil untuk semua kalangan”. (Informan 4)

“Perlu benar diubah kriterianya, jangan cuma nilai doang yang dinilai. Harus dilihat juga latar belakang ekonomi dan kesulitan hidup calon penerima. Banyak yang pintar tapi kurang mampu malah tidak dapat, jadi kriteria harus lebih fleksibel dan adil gasan semua kalangan yang butuh beasiswa”. (Informan 5)

“Perlu, supaya kriteria tidak cuma fokus pada nilai akademik, tapi juga mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi mahasiswa. Ini biar beasiswa lebih tepat sasaran, memberi kesempatan kepada yang benar-benar butuh dan berpotensi, jadi program jadi lebih adil dan berdampak positif”. (Informan 6)

Perlu perubahan kriteria penerima beasiswa agar program lebih adil dan merata. Selain nilai akademik, kriteria harus mempertimbangkan kondisi ekonomi, latar belakang keluarga, dan asal daerah, terutama daerah terpencil. Prestasi non-akademik juga penting untuk dinilai. Evaluasi berkala diperlukan agar kriteria selalu sesuai kebutuhan penerima. Dengan kriteria yang lebih fleksibel dan komprehensif, beasiswa dapat tepat sasaran, membantu mahasiswa yang benar-benar membutuhkan, dan memberikan dampak positif yang lebih luas.

5. Apa peran yang bisa diambil oleh lembaga pendidikan, pemerintah, atau pihak swasta dalam mendukung keberhasilan program ini?

Berdasarkan pertanyaan tersebut berikut petikan jawaban dari masing-masing informan sebagai berikut:

“Lembaga pendidikan harus bantu sosialisasi dan dampingi mahasiswa. Pemerintah siapkan dana dan regulasi yang jelas. Pihak swasta bisa jadi sponsor atau fasilitator beasiswa tambahan. Kalau semua pihak saling dukung dan bekerjasama, program beasiswa Kaltara Unggul pasti berjalan lancar dan manfaatnya terasa sampai ke seluruh lapisan masyarakat”. (informan 1)

“Lembaga pendidikan bisa bantu dampingi mahasiswa, pemerintah menyiapkan kebijakan dan dana, pihak swasta bisa jadi sponsor. Kalau semuanya bekerjasama, program beasiswa ini bisa jalan lancar, manfaatnya jua bisa dirasakan lebih banyak pelajar, terutama yang di daerah pelosok”. (Informan 2)

“Lembaga pendidikan harus bantu sosialisasi dan pendampingan mahasiswa. Pemerintah sediakan dana dan kebijakan yang jelas. Pihak swasta bisa dukung lewat sponsor atau beasiswa tambahan. Kalau semua saling bantu, program ini pasti berhasil dan banyak manfaat buat pelajar”. (Informan 3)

"Lembaga pendidikan bisa bantu mendata mahasiswa yang layak, pemerintah mempercepat proses pencairan, dan pihak swasta bisa ikut nyumbang dana atawa bikin program beasiswa tambahan. Mun semua pihak bekerjasama, program beasiswa ini bisa jalan lebih lancar dan tepat sasaran". (Informan 4)

"Lembaga pendidikan kudu lebih teliti dalam mendata, pemerintah harus ngawasi biar proses berjalan jujur. Pihak swasta jua bisa bantu dana atau fasilitas pendukung. Kalau semua pihak kerja sama dengan serius, beasiswa ini pasti lebih tepat sasaran dan bermanfaat buat yang benar-benar butuh". (Informan 5)

"Lembaga pendidikan harus aktif bantu pendataan dan pantau mahasiswa penerima beasiswa, pemerintah perlu percepat proses administrasi dan pencairan dana, serta pihak swasta bisa beri dukungan dana atau fasilitas. Kalau ketiganya bekerjasama, beasiswa ini pasti lebih efektif dan tepat sasaran". (Informan 6)

Lembaga pendidikan berperan dalam sosialisasi, pendampingan, dan pendataan mahasiswa penerima beasiswa. Pemerintah bertanggung jawab menyediakan dana, regulasi, serta mempercepat proses administrasi dan pencairan dana. Pihak swasta dapat mendukung melalui sponsor, beasiswa tambahan, atau fasilitas pendukung. Kerja sama yang serius dan sinergis antar ketiga pihak sangat penting untuk memastikan program berjalan lancar, tepat sasaran, dan memberi manfaat nyata terutama bagi pelajar di daerah pelosok.

V. PEMBAHASAN

Kekurangan atau kelemahan Dalam Penyaluran Beasiswa Kaltara Unggul

Dari hasil wawancara dengan berbagai informan, ditemukan beberapa kelemahan utama dalam proses penyaluran Beasiswa Kaltara Unggul yang dapat dikategorikan dalam aspek prosedural, teknis, komunikasi, dan kriteria seleksi. Kekurangan-kekurangan ini selaras dengan temuan dari teori dan penelitian terdahulu mengenai program beasiswa dan birokrasi pendidikan.

1. Proses penyaluran yang lama dan kompleks

Informan mayoritas menyebutkan bahwa proses penyaluran beasiswa berjalan cukup panjang, dimulai dari pendaftaran online, seleksi administrasi, verifikasi berlapis, hingga pencairan dana ke rekening mahasiswa melalui bank mitra pemerintah provinsi. Prosedur ini, walaupun bertujuan untuk memastikan transparansi dan akurasi, ternyata menimbulkan birokrasi yang panjang dan berbelit-belit. Salah satu informan bahkan menyebut proses ini lambat dan membingungkan bagi sebagian mahasiswa. Menurut teori birokrasi Weberian, prosedur yang terlalu formal dan kompleks dapat menyebabkan "bottleneck" yang memperlambat pelayanan publik (Weber, 1947). Hal ini sejalan dengan hasil penelitian oleh Wulandari et al. (2020) yang menyebutkan bahwa birokrasi panjang dalam penyaluran beasiswa menyebabkan keterlambatan pencairan dana sehingga berdampak pada motivasi dan keberlangsungan studi penerima beasiswa.

2. Kendala Teknis dan Administratif

Kendala utama yang ditemukan adalah data mahasiswa yang sering tidak lengkap atau salah input, keterlambatan pengumpulan berkas, serta kendala jaringan internet terutama di daerah-daerah terpencil. Hal ini menyebabkan verifikasi data menjadi terhambat dan pencairan dana tidak tepat waktu. Selain itu, komunikasi antar instansi yang kurang lancar juga menjadi hambatan administratif yang signifikan. Hal ini dapat dikaitkan dengan konsep manajemen informasi dalam pelayanan publik, dimana data yang tidak akurat dan kurangnya koordinasi antar lembaga seringkali menyebabkan ineffisiensi proses (Osborne & Gaebler, 1992). Penelitian oleh Putri dan Santoso (2019) juga menunjukkan bahwa kendala jaringan dan administrasi merupakan faktor utama kegagalan dalam implementasi program beasiswa di daerah-daerah dengan infrastruktur terbatas.

3. Informasi yang Kurang Jelas dan Transparansi yang Belum Maksimal

Meskipun proses seleksi dilakukan secara online dan hasil diumumkan secara terbuka, beberapa informan masih merasa informasi tentang hasil seleksi kurang jelas dan penjelasan mengenai tahapan seleksi belum rinci. Ada juga kekhawatiran tentang adanya potensi favoritisme, yang menyebabkan kepercayaan mahasiswa terhadap sistem seleksi menurun. Menurut teori akuntabilitas publik (Bovens, 2007), transparansi dan akuntabilitas merupakan kunci utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap suatu program. Jika informasi tidak disampaikan dengan jelas, maka persepsi ketidakadilan dan kecurigaan terhadap penyalahgunaan kekuasaan dapat muncul. Penelitian oleh Handayani (2018) menyatakan bahwa kurangnya transparansi dalam proses seleksi beasiswa sering menimbulkan ketidakpuasan dan menurunkan partisipasi calon penerima.

4. Kriteria Seleksi yang Terlalu Terbatas

Semua informan sepakat bahwa kriteria penerima beasiswa perlu ditinjau ulang agar lebih adil dan merata. Saat ini, kriteria cenderung lebih fokus pada prestasi akademik (nilai tinggi) dan kurang mempertimbangkan aspek ekonomi keluarga, asal daerah, serta prestasi non-akademik. Hal ini menyebabkan siswa dari latar belakang kurang mampu atau daerah terpencil kurang mendapatkan kesempatan yang adil. Hal ini sesuai dengan teori keadilan distributif (Rawls, 1971) yang menekankan pentingnya distribusi sumber daya secara adil, terutama kepada mereka yang berada pada posisi kurang beruntung. Penelitian oleh Santoso dan

Rahmawati (2021) juga mengungkapkan bahwa program beasiswa yang hanya berfokus pada nilai akademik tanpa mempertimbangkan latar belakang sosial ekonomi cenderung kurang tepat sasaran dan tidak optimal dalam mengurangi kesenjangan pendidikan.

5. Kurangnya Sinergi dan Dukungan Multi Pihak

Informan juga menyoroti perlunya peran aktif dan sinergi antara lembaga pendidikan, pemerintah, dan pihak swasta. Keterlibatan ketiga pihak ini penting untuk memperbaiki sosialisasi, pendampingan mahasiswa, percepatan proses birokrasi, dan peningkatan pendanaan. Keterbatasan peran satu pihak saja dapat menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan program beasiswa. Dalam literatur manajemen publik, kolaborasi multi-stakeholder dianggap sebagai faktor kunci keberhasilan program pelayanan publik (Bryson et al., 2006). Penelitian oleh Nurhasanah (2020) menggarisbawahi pentingnya kemitraan antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan sektor swasta untuk mendukung keberlanjutan program beasiswa dan menjamin pencapaian tujuan sosial.

Berdasarkan hasil wawancara dan dikaitkan dengan teori serta hasil penelitian terdahulu, kekurangan utama dalam penyaluran Beasiswa Kaltara Unggul meliputi Proses birokrasi yang panjang dan lambat sehingga menimbulkan keterlambatan pencairan dana. Kendala teknis dan administratif, seperti data tidak lengkap, jaringan internet yang buruk, dan komunikasi antar instansi yang kurang efektif. Kurangnya transparansi dan kejelasan informasi dalam proses seleksi dan pengumuman hasil yang menimbulkan ketidakpercayaan. Kriteria seleksi yang terlalu fokus pada prestasi akademik tanpa memperhatikan aspek sosial ekonomi dan daerah asal sehingga kurang adil dan merata. Kurangnya sinergi dan dukungan dari lembaga pendidikan, pemerintah, dan pihak swasta yang berperan dalam memperlancar proses dan memperluas jangkauan beasiswa.

Rekomendasi perbaikan dapat diarahkan pada simplifikasi birokrasi, peningkatan sistem informasi dan komunikasi, peninjauan ulang kriteria penerima dengan memasukkan aspek sosial ekonomi, serta penguatan kemitraan multi-pihak agar program beasiswa lebih efektif, adil, dan tepat sasaran. Dengan demikian, Beasiswa Kaltara Unggul diharapkan dapat menjadi solusi yang nyata dalam meningkatkan akses pendidikan bagi generasi muda di wilayah Kalimantan Utara.

Strategi yang Dapat Diambil Untuk Mengoptimalkan Penyaluran Beasiswa

Dari hasil wawancara dengan berbagai informan, ditemukan beberapa strategi yang dapat diambil untuk mengoptimalkan penyaluran beasiswa, diantaranya :

1. Perbaikan Proses Penyaluran Beasiswa

Berdasarkan hasil wawancara, sejumlah informan sepakat bahwa sistem pendataan yang rapi dan akurat sangat penting untuk diperbaiki. Hal ini sejalan dengan teori manajemen program yang menegaskan bahwa data yang valid dan terstruktur adalah dasar efektifitas implementasi program sosial (Bryson, 2018). Ketidakteraturan data berpotensi menyebabkan kesalahan seleksi dan penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran (Rahmi et al., 2020). Selain itu, stabilitas jaringan online menjadi faktor kunci agar proses pendaftaran dan verifikasi dapat berjalan lancar tanpa hambatan teknis. Penelitian oleh Sari & Wahyudi (2019) menunjukkan bahwa infrastruktur teknologi yang memadai dapat meningkatkan efisiensi administrasi beasiswa dan meminimalkan keterlambatan pencairan dana. Hal ini didukung oleh kebutuhan sosialisasi yang merata, khususnya di daerah pelosok yang selama ini kurang mendapat akses informasi (Yuliana et al., 2021). Sosialisasi yang kurang merata dapat menyebabkan mahasiswa yang berhak tidak mengetahui adanya bantuan beasiswa sehingga potensi penerima manfaat menjadi berkurang. Koordinasi antar instansi juga dinilai perlu ditingkatkan agar proses tidak terhambat. Hal ini mencerminkan prinsip good governance yang menuntut kolaborasi lintas sektor untuk menghasilkan pelayanan publik yang efektif dan responsif (UNDP, 2016). Jika koordinasi buruk, maka proses verifikasi dan pencairan dana menjadi lambat, menyebabkan ketidaknyamanan bagi penerima (Informan 3 dan 5).

2. Strategi Efektif untuk Penyaluran yang Tepat Sasaran

Sosialisasi yang meluas dan menyentuh daerah terpencil merupakan strategi utama yang diangkat oleh para informan. Ini sesuai dengan teori komunikasi pembangunan (Servaes, 2008) yang menekankan pentingnya penyebaran informasi yang efektif agar program dapat diterima dan dimanfaatkan secara luas. Seleksi ketat dan transparan juga sangat ditekankan sebagai upaya mencegah penyalahgunaan dan memastikan bantuan sampai ke yang berhak. Teknologi dalam verifikasi data berlapis juga disarankan agar data penerima dapat terjamin validitasnya. Dalam penelitian oleh Hidayat (2020), teknologi digital dalam proses seleksi beasiswa mampu mengurangi subjektivitas dan kesalahan manusia. Evaluasi berkala juga penting agar program dapat terus disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan, sehingga dampak positifnya berkelanjutan (Susanto & Ardiansyah, 2021). Pelibatan lembaga pendidikan dan masyarakat dalam proses verifikasi serta pengawasan menjadi kunci keberhasilan, mengingat mereka lebih mengenal kondisi calon penerima secara langsung. Model partisipatif ini sesuai dengan konsep co-production dalam pelayanan publik yang meningkatkan transparansi dan akuntabilitas (Bovaird, 2007).

3. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi dalam pendaftaran online, verifikasi otomatis, serta pengumuman digital dinilai sangat membantu mempercepat dan mempermudah proses. Pendekatan digital ini mendukung teori e-government yang menyatakan bahwa penggunaan teknologi informasi dapat meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan transparansi pelayanan publik (Heeks, 2006). Informan juga menyinggung bahwa komunikasi antar tim melalui aplikasi digital mempercepat koordinasi, mengurangi hambatan birokrasi, dan meningkatkan kecepatan pencairan dana. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian Putra & Wahyudi (2018) yang menunjukkan bahwa sistem informasi manajemen yang terintegrasi dapat mempermudah monitoring dan evaluasi program beasiswa secara real-time. Menggunakan sistem digital, kesalahan manual dapat diminimalisasi, sehingga data penerima lebih akurat dan proses seleksi menjadi lebih objektif (Sari & Rahman, 2022). Namun, tantangan infrastruktur di daerah terpencil tetap perlu mendapat perhatian agar pemanfaatan teknologi tidak menciptakan kesenjangan baru.

4. Perubahan Kriteria Penerima untuk Keadilan Program

Para informan sepakat bahwa kriteria penerima beasiswa perlu diperluas tidak hanya berdasarkan prestasi akademik, tetapi juga kondisi ekonomi keluarga, latar belakang sosial, dan prestasi non-akademik. Hal ini mencerminkan pendekatan holistik yang direkomendasikan dalam kebijakan bantuan sosial (World Bank, 2019), di mana kriteria multifaset dapat meningkatkan keadilan dan distribusi manfaat program. Penelitian oleh Fitria (2020) menunjukkan bahwa kriteria yang terlalu fokus pada nilai akademik dapat mengabaikan mahasiswa yang berpotensi tetapi memiliki keterbatasan ekonomi, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, evaluasi berkala terhadap kriteria menjadi penting agar sesuai dengan dinamika kebutuhan sosial ekonomi masyarakat penerima. Penyesuaian kriteria yang fleksibel juga mendorong inklusivitas dan pemerataan kesempatan, khususnya bagi mahasiswa dari daerah terpencil yang selama ini kurang mendapat perhatian (Kurniawan et al., 2019).

5. Peran Lembaga Pendidikan, Pemerintah, dan Pihak Swasta

Kerjasama antara lembaga pendidikan, pemerintah, dan pihak swasta sangat krusial. Lembaga pendidikan berperan dalam pendataan, sosialisasi, dan pendampingan mahasiswa, sehingga proses administrasi berjalan lebih lancar dan penerima merasa didukung secara akademik maupun non-akademik (Informan 1, 3, 6). Pemerintah bertanggung jawab menyediakan regulasi, dana, serta mempercepat proses pencairan. Fungsi pemerintah dalam hal ini sesuai dengan teori administrasi publik yang menekankan peran birokrasi sebagai pengelola program sosial (Mardiasmo, 2017). Sementara itu, pihak swasta bisa berkontribusi sebagai sponsor atau penyedia beasiswa tambahan, menambah sumber daya yang tersedia untuk mahasiswa. Model kemitraan antara sektor publik dan swasta (*Public-Private Partnership*) ini telah terbukti efektif dalam berbagai program bantuan pendidikan (Putra & Sari, 2021). Sinergi ketiga pihak dapat menciptakan ekosistem yang mendukung pelaksanaan beasiswa secara optimal dan berkelanjutan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara luas dan tepat sasaran.

Dari hasil wawancara dan kajian teori serta penelitian terdahulu, strategi optimalisasi penyaluran Beasiswa Kaltara Unggul mencakup perbaikan sistem pendataan dan jaringan teknologi, sosialisasi luas terutama ke daerah pelosok, seleksi dan verifikasi data yang ketat dan transparan, serta evaluasi program secara berkala. Pemanfaatan teknologi informasi sangat krusial untuk mempercepat dan mempermudah proses. Perubahan kriteria penerima dengan mempertimbangkan aspek ekonomi dan sosial memastikan keadilan program. Sinergi antara lembaga pendidikan, pemerintah, dan swasta menjadi pondasi keberhasilan program. Dengan strategi ini, program beasiswa dapat berjalan lebih efisien, tepat sasaran, dan berdampak positif bagi masyarakat.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Penyaluran Beasiswa Kaltara Unggul masih menghadapi kendala seperti birokrasi panjang, data tidak lengkap, jaringan internet lambat, dan koordinasi antarlembaga yang lemah. Transparansi seleksi diragukan sebagian mahasiswa, dan informasi hasil seleksi sering kali tidak disampaikan secara jelas dan terbuka. Strategi optimal mencakup sosialisasi menyeluruh hingga pelosok, pendataan akurat, dan verifikasi data berlapis berbasis teknologi. Seleksi harus transparan serta melibatkan kampus dan masyarakat untuk pengawasan. Pemerintah, kampus, dan swasta perlu bersinergi dalam pendanaan, monitoring, dan percepatan proses agar beasiswa tepat sasaran, efisien, serta adil bagi penerima.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang diperoleh ada beberapa saran yang diberikan yaitu membenahi sistem pendataan agar lebih akurat dan terintegrasi, guna meminimalisasi kesalahan input serta keterlambatan dalam proses seleksi dan pencairan. Perlu adanya publikasi hasil seleksi yang lebih jelas dan rinci, agar mahasiswa memahami alasan lolos atau tidaknya mereka, sekaligus membangun kepercayaan terhadap keadilan sistem seleksi. Sosialisasi beasiswa harus diperluas ke daerah-daerah terpencil dengan berbagai media (online dan offline), agar informasi menjangkau semua calon penerima secara merata dan tidak terjadi ketimpangan informasi. Peningkatan dan pemeliharaan sistem online sangat penting agar pendaftaran, unggah berkas, dan verifikasi dapat dilakukan dengan mudah, cepat, dan tanpa hambatan jaringan, terutama di wilayah dengan infrastruktur terbatas.

Kriteria penerima perlu ditinjau ulang dengan mempertimbangkan tidak hanya prestasi akademik, tetapi juga kondisi ekonomi, latar belakang sosial, serta prestasi non-akademik, demi memastikan keadilan distribusi.

REFERENSI

- Basri., Rukaiyah, S., & Suyuthi, N. F. (2024). Analisis Manajemen Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Perspektif Aparatur Desa Sidorejo Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara. *POMA JURNAL: Publish Of Management*, 1(2), 373-386.
- Caldwell, B., & Spinks, J. (1992). *Leading The Self-Managing School*. London: Falmer Press.
- David, F. R., & David, F. R. (2015). *Strategic Management Concepts and Cases*. Pearson.
- Dinas Komunikasi, Informatika, S. dan P. (2023). *Beasiswa Kaltara Unggul, Investasi Pendidikan di Masa Depan*. <https://diskominfo.kaltaraprov.go.id/beasiswa-kaltara-unggul-investasi-pendidikan-di-masa-depan/>
- Dye, T. R. (2017). *Understanding Public Policy*. New Jersey: Prentice Hall.
- Easton, D. (1992). *Approaches to The Study of Politics*. London: Macmillan Publishing Company.
- Glueck, W. F., & Lawrence R. Jauch. (1998). *Manajemen Strategis dan Kebijakan Perusahaan*. Jakarta: Erlangga.
- Hariadi, B. (2003). *Strategi Manajemen*. Malang: Bayu Media Publising.
- Pangerang, A. F., Suyuti, N. F., & Rukaiyah, S. (2024). Peran Pemerintah Kelurahan dalam Pelayanan Administrasi Bagi Masyarakat di Kelurahan Jenebora Kecamatan Penajam Kabupaten Paser Utara. *Jurnal Manajemen dan Organisasi Review (MANOR)*, 6(2), 277-291.
- Rawls, J. (1997). *A Theory of Justice*. USA: Harvard University Press.
- Riyadi, S., Mawardi, L. F., & Nurdin, M. (2024). Analisis Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Dalam Pengelolaan Anggaran Dan Belanja Pada Kantor Wilayah Direktorat Jendral Perbendaharaan Sulawesi Selatan Periode Tahun 2021-2023. *POMA JURNAL: Publish Of Management*, 2(1), 26-31.
- Sihombing, U. (2000). *Pendidikan Luar Sekolah, Manajemen Strategi, Konsep, Kiat dan Pelaksanaan*. Jakarta: PD. Mahkota.
- Sudiantini, D., & Hadita. (2022). *Manajemen Strategi*. Banyumas: CV. Pena Persada.
- Wahyuni, T., Bakri, A. M., Samad, A. A., Djabar, S. A., & Wahyu. (2024). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara. *Jurnal Manajemen dan Organisasi Review (MANOR)*, 6(2), 170-183.
- Terry, G. R. (2018). *Principles of Management*. Homewood: R.D. Irwin.